

KUMPULAN ANALISIS

SIKLUS PEMBAHASAN
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2024

MITRA KOMISI III



Anggaran Badan Narkotika Nasional

Perkembangan Anggaran dan Tantangan BNN dalam Kasus P4GN

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum
Penanggung Jawab: Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E, M.S.E
Oleh: Hafshah Anida Orrefsia, Ratna Christianingrum, Tio Riyono, Leo Iskandar, Fachry Ali Firdaus



PA3KN

Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal
DPR RI

Agustus 2023

Perkembangan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) selama tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan tren fluktuasi (Gambar 1). Di tahun 2021 anggaran BNN sebesar Rp1.413,7 miliar, kemudian meningkat tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.705,0 miliar hingga Rp1.805,8 miliar outlook tahun anggaran 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.536,5 miliar. Pada program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) outlook tahun anggaran 2023 sebesar Rp367 miliar menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2022 dengan program yang sama sebesar Rp322,7 miliar. Akan tetapi, di RAPBN 2024 tercatat anggaran program P4GN menunjukkan penurunan sebesar Rp292,9 miliar. Terlihat pula **perbandingan dari anggaran program dukungan lebih besar dari program utamanya P4GN**, yang meliputi fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, hukum dan kerja sama, bidang data dan informasi, serta layanan laboratorium narkotika. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan penting, **mengapa anggaran program pendukung justru lebih diprioritaskan daripada anggaran program utama P4GN?**



Gambar 1

Perkembangan Anggaran BNN Tahun 2021-2024 (dalam miliar rupiah)

Sumber :
NK RAPBN 2024, diolah (2023)

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020–2024, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan bagian dari agenda pembangunan Prioritas Nasional ke-7 yaitu **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Adapun indikator yang digunakan sebagai acuan program P4GN ialah angka prevalensi. **Pemerintah menargetkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di tahun 2024 mengalami penurunan mencapai 1,69%.**

Gambar 2

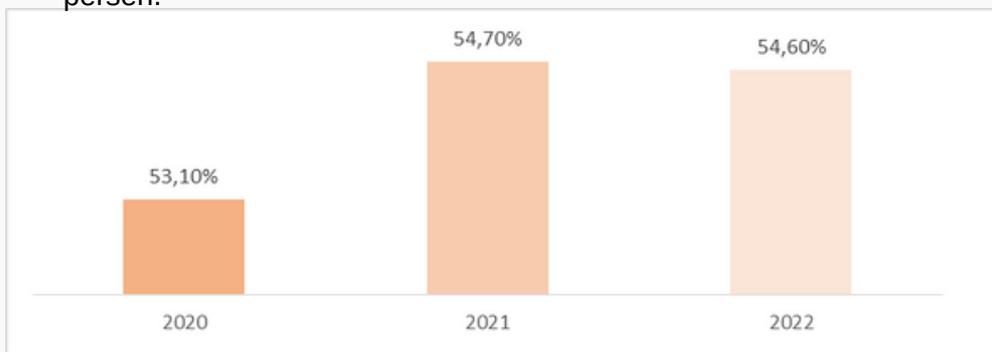
Perkembangan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

Sumber : BNN, diolah (2023)





Dari Gambar 2. dijelaskan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2008 hingga 2021 mengalami fluktuasi, di mana tahun 2014-2017 cenderung menurun sebesar 2,18 persen ke 1,77 persen. Namun di tahun 2017 hingga 2021, menunjukkan adanya tren peningkatan peredaran narkoba di masyarakat. Hal tersebut membawa **kabar buruk bagi pemberantasan narkoba di Indonesia bahwa target angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,69 persen di tahun 2024 semakin sulit untuk dicapai**. Bahkan data yang telah disajikan di buku Indonesia Drug Report tahun 2023 (Gambar 3). menunjukkan Indeks Nasional P4GN dalam 3 tahun terakhir menggunakan sistem pendekatan menyeluruh (input, proses, dan services) tidak banyak perubahan dalam kisaran 53 persen hingga 55 persen.



Gambar 3 Indeks Nasional P4GN

Sumber:
Indonesia Drug Report , diolah (2023)

Maraknya kasus penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari **tren penyalahgunaan narkoba secara internasional**, di mana Indonesia telah menjadi negara tujuan peredaran gelap narkoba, dikarenakan **jumlah penduduk yang besar dan harga jual tinggi**. Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan **banyaknya pintu masuk penyelundupan narkoba melalui laut karena kurangnya pengawasan di wilayah perbatasan**.

Bila dilihat ruang lingkupnya, **peredaran gelap narkoba ini telah menjadi isu global** dan disebut sebagai **kejahatan transnasional (transnational crime)**, dengan empat indikator. **Pertama**, isu tersebut memperoleh perhatian dari para elite pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting dan pemerintah terlibat di dalam perdebatan publik mengenai isu tersebut. **Kedua**, isu tersebut telah memperoleh liputan secara terus menerus dalam pers dunia, surat kabar dan majalah-majalah, tayangan televisi. **Ketiga**, isu tersebut menjadi objek dari studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok profesional di seluruh masyarakat internasional atau dunia. **Keempat**, isu tersebut nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Oleh karena itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu mendorong BNN selaku mitra kerjanya untuk melakukan pemantauan mendalam dan perbaikan komposisi terhadap pelaksanaan anggaran program utamanya yaitu program P4GN agar lebih sistematis dan akuntabel. Mengingat Indonesia telah menjadi negara "Darurat Narkoba", dan upaya program P4GN adalah menyelamatkan generasi mendatang, anak bangsa dari serbuan global peredaran gelap narkoba.

PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA PPATK



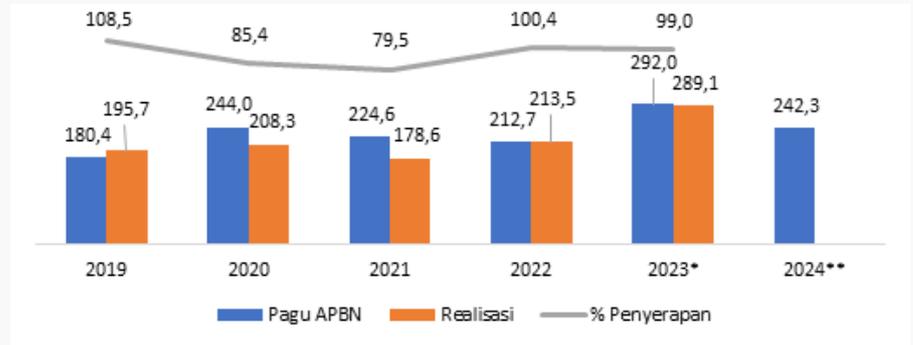
Agustus 2023

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum
 Penanggung Jawab: Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E, M.S.E
 Oleh: Tio Riyono, Ratna Christianingrum, Leo Iskandar, Fachry Ali Firdaus, Hafshah Anida Orrefisia

Perkembangan Anggaran

Anggaran PPATK 2019-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1%, dari Rp180,4 miliar (2019) menjadi Rp242,3 miliar (RAPBN 2024). Dari sisi penyerapan anggaran 2019-2023, PPATK pernah mencapai hanya 79,5%. Namun setelah itu, penyerapan menunjukkan perbaikan hingga diperkirakan dapat mencapai 99% pada 2023.

Grafik 1. Perkembangan Realisasi Anggaran PPATK (miliar rupiah)



*) Realisasi outlook 2023 **) NK RAPBN 2024

Sumber: LKPP 2019-2022, Nota Keuangan RAPBN TA 2024, diolah (2023)

Belanja PPATK mayoritas pada program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen masih mendominasi belanja PPATK. Pada RAPBN 2024, anggaran program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme mengalami penurunan signifikan 36,7% sedangkan dukungan manajemen turun hanya 5,7%. Apabila melihat data 2019-2024, program dukungan manajemen tumbuh rata-rata 11,0% per tahun sedangkan program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme turun rata-rata 6,93% per tahun. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, **mengapa anggaran program pendukung jauh lebih diprioritaskan dari anggaran program utama PPATK?**

Tabel 1
 Program PPATK
 2019-2024
 (miliar rupiah)

K/L	Program	2019	2020	2021	2022	RAPBN			
						2023	2024	% Perubahan	
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		195,69	208,27	178,58	213,50	289,1	242,3	-16,2%	
a.	Program Dukungan Manajemen	Pengawasan internal PPATK	0,57	0,28	0,08	0,14			
		Pengelolaan perencanaan dan keuangan PPATK	73,38	101,73	115,43	133,23			
		Pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan PPATK	6,82	4,23	3,05	3,38	191,3	180,40	-5,7%
		Penyeleenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan PPATK	26,26	30,38	27,32	32,56			
b.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang PPATK	20,10	21,52	0,85	2,21			
		Pengelolaan bidang hukum PPATK	1,87	0,95	0,59	1,29			
		Pelaksanaan kerja sama dan humas PPATK	16,02	3,61	1,31	7,55			
		Pengelolaan teknologi informasi PPATK	37,46	36,26	25,30	25,39			
		Pengawasan kepatuhan pihak pelapor	1,48	0,31	0,22	0,62	97,8	61,9	-36,7%
		Pengawasan kewajiban pelaporan dan pembinaan pihak pelapor	2,40	0,66	0,25	0,61			
		Analisis transaksi dan pengelolaan laporan masyarakat	1,34	0,71	0,22	2,02			
Pemeriksaan dan pengembangan riset TPPU	7,97	7,61	3,96	4,51					

Sumber: Lakip 2019-2022, NK RAPBN 2023-2024, diolah (2023)

Dilihat dari Jenis Belanjanya, Komposisi Terbesar Anggaran Dibelanjakan Untuk Belanja Barang

Berdasarkan struktur belanja PPATK menurut jenis belanja, pada tahun 2013-2022 terjadi pergeseran komposisi terbesar per jenis belanja, dari belanja barang menjadi belanja pegawai. Belanja pegawai meningkat dikarenakan adanya peningkatan gaji pokok, tunjangan, uang makan, dll. Hal ini senada dengan evaluasi dalam LKPP TA 2022 bahwa pesatnya modus dan tipologi TPPU-PT global mengharuskan PPATK melakukan penguatan sumber daya manusia. Namun signifikansinya perubahan proporsi belanja pegawai tersebut perlu menjadi bahan evaluasi **apakah penggunaannya sudah mencerminkan kebutuhan penguatan sumber daya manusia PPATK.**

Grafik 2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber: LKPP 2013-2022, diolah (2023)



Indeks Efektivitas Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Dan Pendanaan Terorisme Indonesia Selalu Mencapai Target Namun Perlu Memperhatikan Beberapa Hal

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme Indonesia diukur melalui 2 (dua) sub dimensi, yaitu pencegahan dan pemberantasan. Hasilnya, indeks selalu melebihi target yang ditetapkan (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan Indikator Kinerja

Sumber: Lakip PPATK 2020-2022, diolah (2023)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme Indonesia.	5,46	6,98	5,73	6,89	6,16	7,47

Meskipun indeks tersebut menunjukkan prestasi, PPATK perlu meningkatkan efektivitas program termasuk mengatasi permasalahan di daerah. Berdasarkan evaluasi risiko nasional terhadap tindak pidana pendanaan terorisme tahun 2021, terungkap bahwa DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah termasuk daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap pendanaan terorisme. Ini disebabkan oleh keberadaan berbagai organisasi dan jaringan terkait, serta jumlah yang signifikan dari simpatisan di wilayah-wilayah ini, yang secara besar memengaruhi aliran dana di kawasan tersebut (PPATK, 2022). Ditambah lagi, PPATK menjadi bagian terpenting dalam isu yang menjadi perhatian Pemerintah diantaranya Green Financial Crime dan Deteksi yang mengindikasikan TPPO. Sehingga kerja-kerja PPATK ke depan diharapkan akan memberikan hasil yang lebih optimal dengan ketersediaan anggaran dalam RAPBN 2024.

Selain itu, PATK juga sedang menuju anggota tetap FATF. Indonesia berkomitmen penuh untuk dapat diterima menjadi negara anggota FATF (full membership) pada 2023. Namun faktanya sejak Juni 2019, Indonesia masih berstatus sebagai observer FATF. Menjadi anggota tetap FATF akan memberikan dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri (PPATK, 2023). Menjadi anggota tetap FATF memang bukan merupakan proses yang mudah dan singkat. **Namun perlu juga diketahui, apa saja hambatan selama ini yang masih dihadapi PPATK.** Sehingga DPR RI melalui Komisi III dapat membuka diskusi dalam penyelesaian hambatan-hambatan tersebut.

Anggaran Komnas HAM

Perkembangan Anggaran Dalam Menyikapi Isu Prioritas Komnas HAM

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum
 Penanggung Jawab: Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E, M.S.E
 Oleh: Hafshah Anida Orrefsia, Ratna Christianingrum, Tio Riyono, Leo Iskandar, Fachry Ali Firdaus



PA3KN

Badan Keahlian
 Sekretariat Jenderal
 DPR RI

Agustus 2023

Berbagai macam aduan yang diterima Komnas HAM dan peristiwa-peristiwa berdimensi hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat dimana dalam penanganannya tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, Komnas HAM telah menetapkan salah satu **isu prioritas** yang paling banyak diadukan yaitu **konflik agraria**.

Gambar 1 Sebaran Berdasarkan Tematik Permasalahan



Sumber: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2022

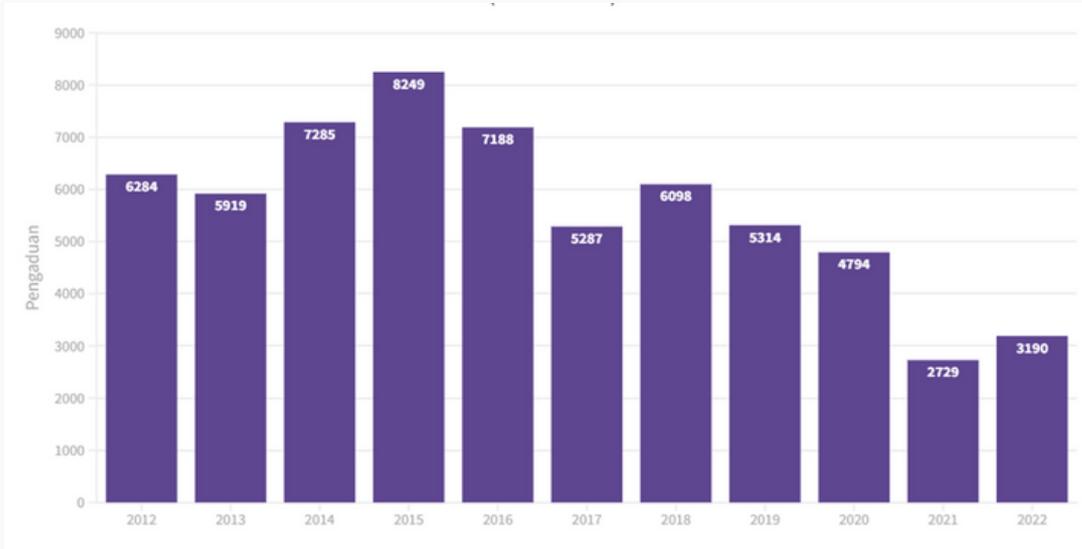
Gambar 1. menunjukkan **wilayah Sumatera Utara dengan 165 kasus telah menjadi isu konflik agraria terbanyak** yang diadukan provinsi ini dan melibatkan masyarakat dengan korporasi swasta, BUMN, dan pemerintah. Dalam perkembangannya, konflik tersebut tidak hanya didominasi sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan semata, tapi juga penguasaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dan infrastruktur. Konflik agraria ini diantaranya merupakan dampak dari pendekatan pembangunan pemerintah yang mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik yang mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak atas tanah masyarakat. Berapa anggaran Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus ini?

Tabel 1
 Perkembangan Anggaran Komnas HAM 2019-2022
 (dalam miliar rupiah)

Sumber:
 Laporan Keuangan Komnas HAM (diolah) (2023)

Sasaran Program	2019	2020	2021	2022
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	45,5	40,2	26,9	25,8
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara		5,3	6,1	5,3
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM		9,3	7,2	11,2
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban		25,5	13,6	9,2
Program Dukungan Manajemen	57,7	65,2	73,7	73,6
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Internal		5,1	3,5	1,23
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan			57,9	58,7
Dukungan Internal Komnas Perempuan			11,9	12,4
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama				1,21

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan anggaran Komnas HAM di tahun 2019 hingga 2022 pada program dukungan manajemen anggaran menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Berbeda dengan program pemajuan dan penegakan HAM di periode yang sama menunjukkan penurunan. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar, **mengapa anggaran dari program pendukung lebih besar dari anggaran program utamanya? Sedangkan seperti yang tertera pada tabel bahwa sebagian anggaran di program dukungan hanya digunakan untuk keperluan internal.** Bagaimana dengan jumlah pengaduannya?



Gambar 2
Data Jumlah Pengaduan

Sumber :
Komnas HAM (2022)

Data di atas menjelaskan adanya tren penurunan sejak tahun 2012. Namun, jumlah pengaduan kembali meningkat pada tahun 2015 sebanyak 8.249 kasus. Sementara, pengaduan paling sedikit terjadi di tahun 2021 sebanyak 2.729 kasus. **Pertanyaannya, apakah jumlah pengaduan HAM ini menurun karena memang sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang terselesaikan atau justru banyak yang tidak selesai karena terbatasnya anggaran? Mengingat banyaknya kasus yang tidak terselesaikan karena terbatasnya anggaran.**

Gambar 3 Perkembangan Anggaran Program Pemajuan dan Penegakan HAM dan Jumlah Pengaduan

Sumber: Laporan Keuangan Komnas HAM (diolah) (2023)



Dilihat dari gambar 3, menunjukkan tidak adanya kesamaan pola antara perkembangan anggaran program pemajuan dan penegakan HAM dengan jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM. Namun, memang terlihat perbedaannya sangat tipis. Hasil tersebut seharusnya bisa sejalan. **Oleh karena itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu memerintahkan Komnas HAM agar melakukan pemantauan mendalam terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan agar dapat totalitas dalam menangani hasil pengaduan yang telah sering diadakan yaitu mengenai konflik agraria.**

Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perbaikan Komposisi Anggaran dan Strategi KPK

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum
Penanggung Jawab: Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E, M.S.E
Oleh: Leo Iskandar, Ratna Christianingrum, Tio Riyono, Fachry Ali Firdaus, Hafshah Anida Orrefisia

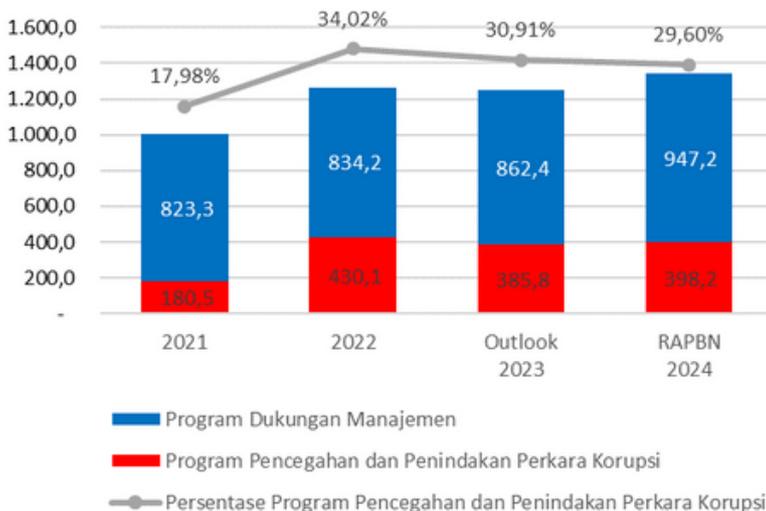


PA3KN

Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal
DPR RI

Agustus 2023

Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, perkembangan anggaran KPK menunjukkan tren peningkatan (Gambar 1). Anggaran KPK tahun 2021 sebesar Rp1.003,8 miliar meningkat menjadi sebesar Rp1.345,4 miliar pada tahun 2024. Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi pada outlook tahun anggaran 2023 sebesar Rp385,8 miliar menunjukkan penurunan dibandingkan anggaran program yang sama pada tahun anggaran 2022, yakni sebesar Rp430,1 miliar. Pada RAPBN 2024, anggaran program tersebut nampak menunjukkan peningkatan menjadi sebesar Rp398,2 miliar. Namun jika dilihat secara persentase, **terjadi penurunan anggaran Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi setiap tahunnya untuk periode tahun 2022-2024**, di mana anggaran program tersebut pada tahun 2024 hanya sebesar 29,6% dari anggaran KPK tahun tersebut.



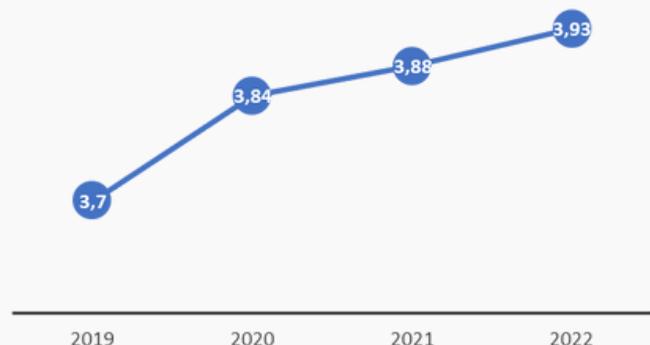
Gambar 1 Perkembangan Anggaran KPK Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: NK RAPBN 2024, diolah (2023)

Salah satu indikator pengukuran kinerja pemberantasan korupsi di dalam RPJMN 2020-2024 adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Sejak tahun 2019, yang merupakan tahun dasar dalam penyusunan target RPJMN 2020-2024, **IPAK menunjukkan tren peningkatan yang relatif kecil setiap tahunnya** (Gambar 2). Adapun rata-rata kenaikan per tahun adalah sebesar 7,7 basis point, dengan kenaikan tertinggi sebesar 0,14 pada tahun 2020 dan terendah sebesar 0,04 pada tahun 2021. Sementara, untuk mencapai target nilai indeks sebesar 4,14 di tahun 2024, kenaikan per tahun seharusnya sebesar 8,8 basis point. Berdasarkan posisi terkini, masih diperlukan kenaikan sebesar 0,21 atau rata-rata 10,5 basis point setiap tahunnya.

Gambar 2
Indeks Perilaku Anti Korupsi
Tahun 2019-2022

Sumber:
Indeks Perilaku Anti Korupsi 2022
BPS, diolah (2023)

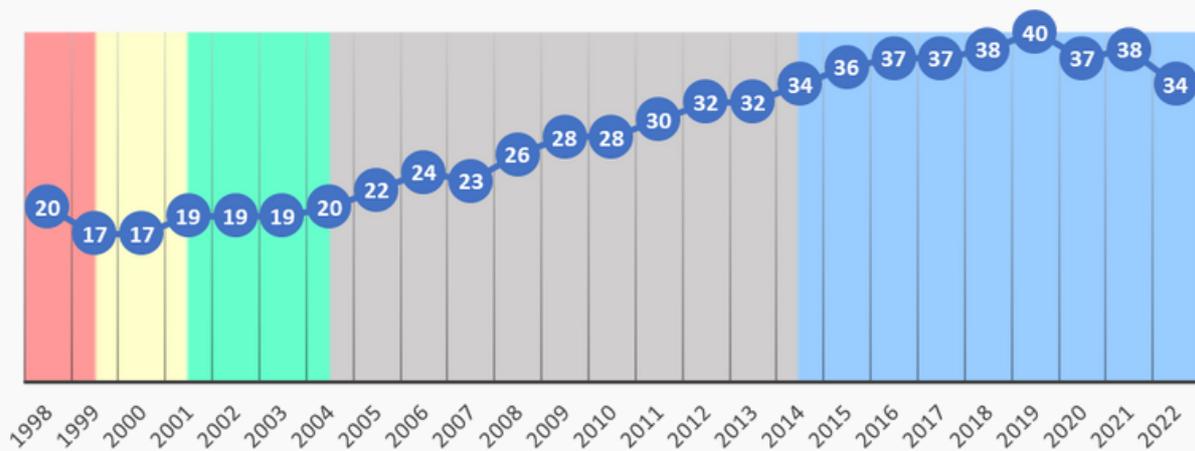




Penyusunan IPAK berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi pengalaman dan dimensi persepsi. Kenaikan IPAK tahun 2020 cukup tinggi yang disebabkan karena adanya peningkatan indeks pengalaman yang tinggi, yaitu sebesar 26 basis point, meskipun indeks persepsi turun sebesar 12 basis point. Sementara itu, kenaikan IPAK tahun 2021 landai yang disebabkan karena indeks pengalaman turun sebesar 1 basis point, meskipun indeks persepsi naik tinggi yakni sebesar 15 basis point. **Untuk mendorong peningkatan nilai IPAK, pemerintah perlu mengarahkan fokus melakukan inovasi kepada program di dimensi pengalaman karena dimensi ini yang memberikan bobot yang lebih besar kepada perhitungan nilai IPAK dibandingkan dengan dimensi persepsi.** Adapun dimensi pengalaman menggambarkan pengalaman masyarakat sehubungan dengan perilaku anti korupsi, khususnya ketika menggunakan layanan publik. Berbeda dengan dimensi persepsi yang berkaitan dengan sosialisasi mengenai anti korupsi yang dilakukan pemerintah.

Sebaliknya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diukur oleh The Transparency International menunjukkan tren penurunan pada periode tahun 2019-2022 (Gambar 3). IPK Indonesia di tahun 2022 pada skala 0-100 adalah sebesar 34. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPK Indonesia mengalami penurunan sebesar 4 poin. **Penurunan ini merupakan penurunan yang paling drastis sejak 1998.**

Gambar 3 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1998-2022



Sumber: Indeks Persepsi Korupsi 2022 The Transparency International, diolah (2023)

Komisi III DPR RI selaku mitra kerja KPK perlu mendorong perbaikan komposisi anggaran KPK yang berfokus kepada program utama KPK, yaitu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi. Berikutnya, strategi dan program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK agar diarahkan kepada penciptaan nilai tambah kepada pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan publik yang bebas dari praktik korupsi. Komisi III juga perlu mendorong upaya pencegahan korupsi dan penguatan lembaga agar terjadi peningkatan kepercayaan internasional terhadap upaya memerangi korupsi di Indonesia.

Kemenkum HAM:

Overcrowded Lapas, Pemanfaatan BMN, dan Isu Overstay

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum
 Penanggung Jawab: Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E, M.S.E
 Oleh: Fachry Ali Firdaus, Ratna Christianingrum, Leo Iskandar, Tio Riyono, Hafshah Anida Orrefsia



PA3KN

Badan Keahlian
 Sekretariat Jenderal
 DPR RI

Anggaran Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Meskipun terjadi tren peningkatan anggaran, pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan anggaran Kemenkum HAM. Penurunan anggaran di tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan refocussing anggaran. Penurunan anggaran tersebut kemungkinan terjadi kembali di tahun 2024.

Gambar 1 Perkembangan Anggaran Kemenkum HAM 2019 – 2024 (dalam triliun rupiah)



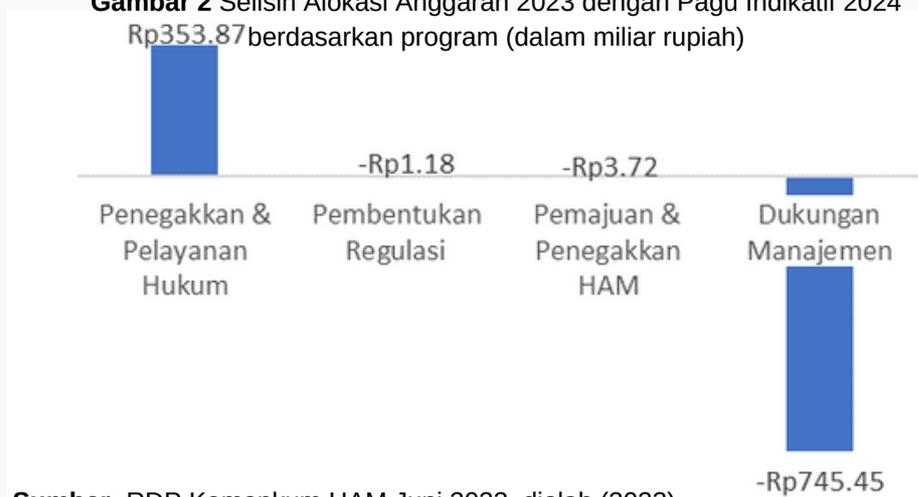
Anggaran Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 sebesar Rp18,19 triliun. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp396.5 miliar dibandingkan anggaran tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan outlook anggaran 2023, dapat dilihat bahwa hanya 2 program yang mengalami penurunan, yaitu program pembentukan regulasi dan program dukungan manajemen.

Sumber: LKPP, RDP Kemenkum HAM Juni 2023, diolah (2023)

Di sisi lain, program penegakan dan pelayanan hukum serta program pemajuan dan penegakan HAM mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan struktur anggaran oleh Kemenkum HAM. **Komisi III perlu mendorong upaya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas struktur anggaran Kemenkum HAM, dimana anggaran program kinerja utama Kemenkum HAM tetap lebih besar proporsinya dibandingkan anggaran program pendukung.**

Besaran anggaran Kemenkum HAM terpaut cukup jauh dari pagu usulan yang sebesar Rp20.4 triliun. Oleh karena itu Kemenkumham mengajukan usulan tambahan pagu indikatif sebesar Rp2.29 triliun, yang direncanakan untuk membiayai kekurangan pada 4 program.

Gambar 2 Selisih Alokasi Anggaran 2023 dengan Pagu Indikatif 2024 berdasarkan program (dalam miliar rupiah)



Sumber: RDP Kemenkum HAM Juni 2023, diolah (2023)

Overcrowded Lapas

Per 27 Agustus 2023, jumlah agregat penghuni Lapas, Rutan, LPKA, dan LPP mencapai 268,450 orang, sedangkan kapasitas total fasilitas hunian tersebut hanya mencapai 136,604. Oleh karena itu **kapasitas fasilitas hunian tersebut sudah mencapai 196.5% atau hampir 2 kali lipat kapasitas maksimalnya.** Hal tersebut menjadikan Indonesia pada peringkat 23 dunia dan 4 di ASEAN dalam kepadatan/overcrowded Lapas.

Gambar 3 Perkembangan Anggaran Ditjen Pemasyarakatan (dalam triliun rupiah)



Sumber: LKPP, RDP Kemenkum HAM Juni 2023, diolah (2023)

Percepatan penyelesaian RUU Narkotika dan akselerasi implementasi keadilan restoratif diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan overcrowded Lapas serta mengurangi kebutuhan anggaran yang meningkat setiap tahun seiring meningkatnya populasi warga binaan. **RUU Narkotika dapat menjadi solusi bagi isu overcrowded lapas dan menghemat anggaran per narapidana per tahun sebesar Rp624,308.00.** Solusi tersebut perlu mempertimbangkan dampak anggaran lain yaitu kebutuhan rehabilitasi yang nilai anggarannya lebih besar. Berdasarkan perhitungan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), Kebutuhan rehabilitasi narapidana narkotika mencapai Rp36,1 triliun dan per tahunnya adalah Rp2,4 triliun. Oleh karena itu, solusi rehabilitasi perlu disusun dengan pertimbangan tidak menambah beban keuangan negara diantaranya dengan skema burden-sharing dengan penyalahguna narkotika dan menggandeng pihak swasta terkait ketersediaan fasilitas rehabilitasi.

Selain itu, keadilan restoratif (restorative justice) yang menjadi bagian dari roadmap penataan regulasi jangka Panjang terkait revitalisasi pemasyarakatan, juga menjadi harapan solusi overcrowding lapas. Berdasarkan kajian yang dilakukan PA3KN di Bulan Agustus 2023, dari capaian penerapan keadilan restoratif tahun 2023 di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dengan jumlah 18.009 perkara, keadilan restoratif dapat menghemat anggaran mencapai Rp57.8 miliar. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif perlu untuk semakin didorong dan didukung.

Temuan BPK terkait Pemanfaatan BMN

Terkait pemanfaatan BMN Kemenkumham, terdapat beberapa catatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Hukum dan HAM di beberapa lokasi sampling. Diketahui bahwa terdapat 258,575.14 m² atau 25.85 ha objek pemanfaatan BMN yang dimanfaatkan pihak lain dengan pendapatan sewa pada periode pemeriksaan senilai Rp39,4 miliar. Namun, pemanfaatan oleh pihak lain tersebut memiliki permasalahan yang diantaranya mengakibatkan BMN yang berstatus sengketa berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, **permasalahan terkait pemanfaatan BMN juga mengakibatkan kurangnya PNBP yang diterima sebesar Rp8.8 miliar dan potensi PNBP yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp1.5 miliar.**

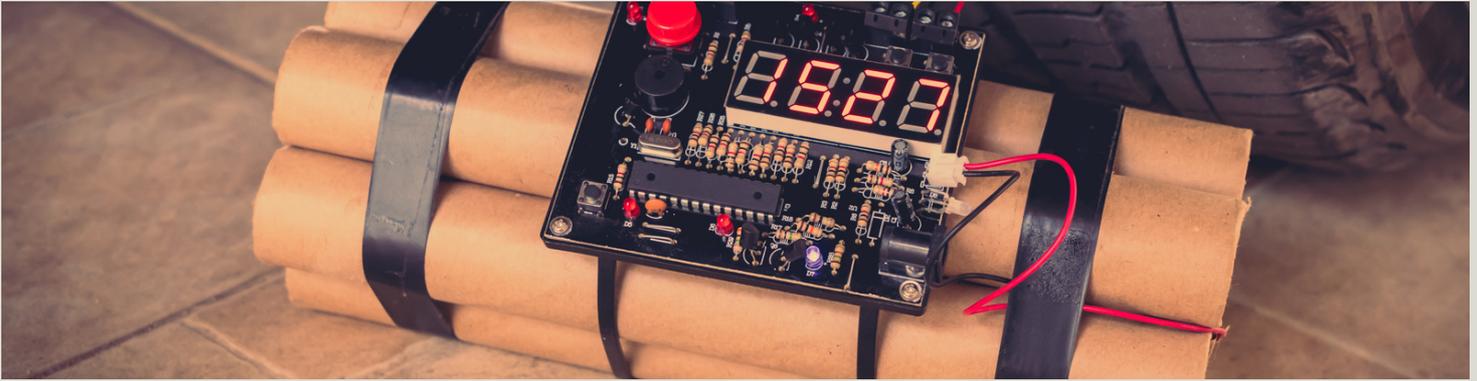


Temuan BPK terkait *Overstay*

Mengenai isu *overstay*, berdasarkan LHP BPK yang sama terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi perhatian. Pengendalian aplikasi terkait visa, izin tinggal, dan aplikasi atau sistem terkait lainnya belum optimal dalam membentuk lingkungan pengendalian data yang akurat dan berkualitas. Hal tersebut tergambar pada aplikasi izin tinggal yang belum secara konsisten menghitung orang asing yang terindikasi *overstay*, pengendalian terhadap pemrosesan *overstay* pada APK yang belum memadai, dan aplikasi izin tinggal belum memiliki fitur untuk monitoring orang asing yang terindikasi *overstay* secara real time. Hal tersebut secara finansial mengakibatkan **kekurangan PNBP dari denda *overstay* pada periode 2020 – 2022 semester I minimal sebesar Rp389 juta dan potensi kekurangan PNBP dari denda *overstay* sebesar Rp50,5 miliar.**

DPR RI khususnya Komisi III diharapkan dapat mendorong upaya penyelesaian *overcrowded* Lapas melalui dukungan perluasan praktik keadilan restoratif, termasuk diantaranya dalam RUU Narkotika. Pada isu temuan BPK terkait pemanfaatan BMN di Kemenkum HAM, Komisi III dapat mendorong Kemenkum HAM untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK diantaranya untuk menghindari pemanfaatan aset negara oleh pihak lain. Pada isu *overstay*, Komisi III perlu mendorong Kemenkum HAM untuk melakukan perbaikan pada pengendalian aplikasi terkait visa, izin tinggal, dan aplikasi atau sistem terkait lainnya agar pengawasan terkait WNA yang terindikasi *overstay* dapat lebih baik, serta kerugian finansial dari kekurangan atau potensi kekurangan PNBP dapat dicegah di masa mendatang.

KAJIAN TEMATIK KOMISI III



Perkembangan Anggaran BNPT



Anggaran BNPT mengalami peningkatan sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19, meskipun belum mencapai anggaran sebelum pandemi secara penuh.

Perlunya Penguatan Anggaran BNPT dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Oleh: Leo Iskandar, Ratna Christianingrum, Tio Riyono

Perkembangan anggaran BNPT dalam periode tahun 2018-2024 menunjukkan tren penurunan (Gambar 1). Penurunan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2020, dampak dari *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19. Adapun pada tahun tersebut, anggaran BNPT turun sebesar Rp215,7 miliar atau 33,5% dari anggaran tahun sebelumnya. Hal ini berimbas kepada merosotnya peringkat Global Terrorism Index Indonesia menjadi peringkat ke-20, yang merupakan peringkat terburuk Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2021, BNPT kembali mengalami penurunan anggaran. Pada periode selanjutnya, anggaran BNPT mengalami peningkatan sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19, meskipun belum mencapai anggaran sebelum pandemi secara penuh.

Pemburukan Indikator Kinerja



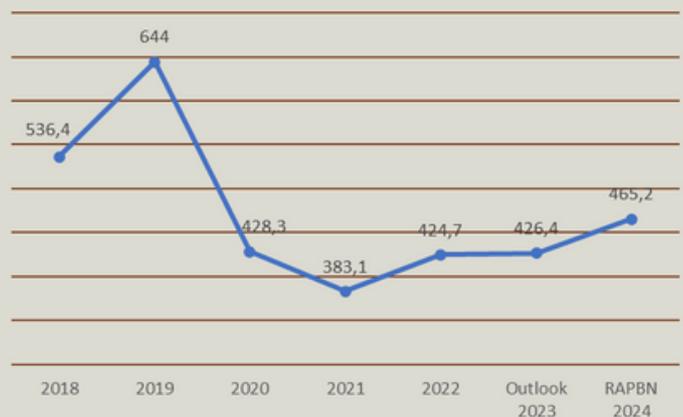
Selama lima tahun terakhir, skor Global Terrorism Index Indonesia memburuk dari 5,07 di tahun 2018 menjadi 5,502 di tahun 2022. Indonesia masuk ke dalam daftar 25 negara paling terdampak terorisme.

Perubahan Pendekatan Terorisme



Pendekatan yang digunakan tidak secara terang-terangan melakukan atau mengajak untuk melakukan konfrontasi secara langsung (*hard approach*) melainkan lebih kepada membuat masyarakat terjerumus dalam paham radikalisme dan terorisme, bahkan tanpa masyarakat menyadarinya (*soft approach*).

Gambar 1 Perkembangan Anggaran BNPT 2018-2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: NK RAPBN 2023-2024, diolah (2023)

Pengarah: Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum

Penanggung Jawab: Dr. Ari Muliana Ginting, S.E, M.S.E.

Pengukuran Indikator Kinerja

Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) yang dikeluarkan Institute for Economics & Peace (IEP), selama lima tahun terakhir skor GTI Indonesia naik dari 5,07 di tahun 2018 menjadi 5,502 di tahun 2022 [1] (Gambar 2). **Bukannya menunjukkan penurunan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, skor GTI Indonesia justru menunjukkan tren sebaliknya.** Dengan demikian, target skor GTI Indonesia pada tahun 2024 sebesar 4,24 menjadi semakin sulit untuk dapat direalisasikan.

Gambar 2 Perkembangan Global Terrorism Index Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: Global Terrorism Index 2019-2023, diolah (2023)

Anggaran BNPT menunjukkan hubungan yang terbalik dengan skor GTI Indonesia untuk data tahun 2018-2022 (Gambar 3). Ketika anggaran BNPT naik menjadi Rp644 miliar di tahun 2019, skor GTI Indonesia menunjukkan angka yang rendah, yakni sebesar 4,629. Ketika anggaran BNPT turun melebihi anggaran tahun 2018, kenaikan skor GTI Indonesia juga melebihi skor untuk data tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran BNPT dapat memperbaiki skor GTI Indonesia.

Peningkatan anggaran BNPT dapat memperbaiki skor GTI Indonesia

Gambar 3 Perbandingan Anggaran BNPT dengan GTI-Score Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: NK RAPBN 2023-2024, GTI 2019-2023, diolah (2023)



Selama lima tahun terakhir, Indonesia tetap berada dalam kategori terdampak terorisme sedang. Ekstremisme keagamaan telah menjadi motif serangan-serangan teroris di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya. Namun pada tahun-tahun terakhir, serangan teroris di Indonesia semakin diperparah oleh kelompok separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal ini mendukung penelitian Polo (2020) yang mengemukakan bahwa kelompok teroris yang paling aktif di dunia mayoritas berasal dari latar belakang etnis dan agama yang sama.

Terdapat tujuh serangan aksi teroris di Indonesia yang mengakibatkan 25 kematian pada tahun 2022 (GTI, 2023). Dari sisi jumlah, insiden di tahun 2022 merupakan yang paling sedikit sejak tahun 2014. Jumlah serangan aksi teroris turun sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, terjadi peningkatan angka kematian sebesar satu korban jiwa. Hal ini menyebabkan serangan terorisme di Indonesia saat ini lebih mematikan dari sebelumnya, dengan rata-rata 3,6 kematian per kejadian aksi teroris, naik dari 1,5 kematian per kejadian pada tahun 2021. Berdasarkan laporan GTI tahun 2021 hingga 2023, Indonesia masuk ke dalam daftar 25 negara paling terdampak terorisme.

Selain GTI, indikator lainnya di dalam RPJMN 2020-2024 yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya yang terkait dengan terorisme adalah Indeks Risiko Terorisme (IRT). IRT dimensi pelaku mengukur persentase antara jumlah pelaku tindak terorisme dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut, sementara dari sisi target, IRT mengukur jumlah potensi daerah yang menjadi sasaran penyerangan terorisme. Berlawanan dengan GTI, hasil IRT yang dikeluarkan BNPT tahun 2022, baik untuk dimensi pelaku maupun dimensi target, menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian melebihi target RPJMN yang ditetapkan. IRT dimensi pelaku tahun 2022 sebesar 29,48; lebih rendah dari target tahun 2024 sebesar 37,80. IRT dimensi target tahun 2022 sebesar 51,54; lebih rendah dari target tahun 2024 sebesar 54,00. Dasar pengukuran yang berbeda ini yang menyebabkan hasil IRT bertolak belakang dengan GTI yang menjelaskan risiko terorisme di Indonesia saat ini, di mana kejadian aksi teroris memang menurun, namun dampak yang diakibatkan justru lebih besar dari sebelumnya.

Kejadian aksi teroris memang menurun, namun dampak yang diakibatkan justru lebih besar dari sebelumnya

[1] Laporan GTI mengukur dampak dari aktivitas terorisme terhadap suatu negara dalam skala 0-10, di mana semakin tinggi nilai skor menunjukkan semakin tinggi pula dampak yang ditimbulkan. Negara diurutkan berdasarkan peringkat di mana negara dengan nilai terburuk akan diurutkan sebagai peringkat pertama.

Perubahan Pendekatan Terorisme

Mantan Kepala BNPT, Suhardi Alius, mencatat bahwa pada tahun 2019 terdapat perubahan dalam metode penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Metode penyebaran ini telah berubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional, tertutup, dan terbatas menjadi komunikasi massa digital yang terbuka melalui teknologi internet, seperti media sosial dan situs web. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel (2023) yang menyatakan bahwa memang telah terjadi perubahan strategi dalam penyebaran paham terorisme. Pendekatan yang digunakan tidak secara terang-terangan melakukan atau mengajak untuk melakukan konfrontasi secara langsung (*hard approach*) melainkan lebih kepada membuat masyarakat terjerumus dalam paham radikalisme dan terorisme, bahkan tanpa masyarakat menyadarinya (*soft approach*) (Khoiri, 2023). Adapun sasaran yang dituju utamanya adalah remaja dan perempuan, di mana secara sosiologis kedua kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan paham radikalisme (Rasyid, 2018).

Paikah (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme yang dilakukan di Indonesia melalui dua pendekatan: penindakan (*hard approach*) yang menjadi kewenangan kepolisian dan pencegahan (*soft approach*) yang difokuskan kepada BNPT. Pendekatan yang dilakukan BNPT lebih kepada upaya mereduksi radikalisme menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk menghindari pembentukan rasa dendam atau jenis kekerasan baru. Dalam menjalankan pendekatan *soft approach* tersebut, BNPT bertanggung jawab

dalam pelaksanaan deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Hal ini terkait dengan pencapaian sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional di dalam RPJMN 2020-2024, di mana BNPT melakukan penguatan keamanan dalam negeri yang diwujudkan dengan peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme.

Postur anggaran BNPT memang telah menunjukkan alokasi anggaran yang ideal dengan menitikberatkan pada program utama BNPT, yaitu Program Penanggulangan Terorisme. Namun, untuk mengoptimalkan peran BNPT dalam melawan terorisme, Komisi III DPR RI perlu berupaya untuk meningkatkan anggaran BNPT agar setidaknya kembali pada level sebelum pandemi. Dengan adanya tambahan anggaran tersebut memberikan ruang kepada BNPT untuk dapat meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan untuk melakukan kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi terhadap paham radikalisme dan terorisme. Kemudian, dukungan anggaran juga diperlukan BNPT untuk memperkuat koordinasi dalam hal penguatan integrasi yang mencakup unsur pemerintah, pemimpin agama, akademik, media massa, maupun masyarakat dalam pengarusutamaan anti-radikalisme dan anti-terorisme. Terakhir, upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi tidak bisa efektif jika dilakukan hanya secara temporal saja. Perlu adanya kesinambungan dalam upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi di Indonesia, khususnya dukungan anggaran secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.



Untuk mengoptimalkan peran BNPT dalam melawan terorisme, Komisi III DPR RI perlu berupaya untuk meningkatkan anggaran BNPT agar setidaknya kembali pada level sebelum pandemi



Referensi

- Institute for Economics & Peace. (2023). Global Terrorism Index 2023: Measuring the Impact of Terrorism. Diakses dari <http://visionofhumanity.org/resources>
- Institute for Economics & Peace. (2022). Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism. Diakses dari <http://visionofhumanity.org/resources>
- Institute for Economics & Peace. (2020). Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism. Diakses dari <http://visionofhumanity.org/reports>
- Institute for Economics & Peace. (2019). Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism. Diakses dari <http://visionofhumanity.org/reports>
- Kementerian PANRB. (2022). BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radikalisme-di-2022-turun>
- Kementerian Kominfo. (2019). BNPT: Internet Jadi Media Penyebarluasan Terorisme. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/18602/bnpt-internet-jadi-media-penyebarluasan-terorisme/0/berita_satker
- Khoiri, A. (2023). Soft Approach Radicalization; Siapa Saja Ancaman untuk NKRI? Diakses dari <https://www.harakatuna.com/soft-approach-radicalization-siapa-saja-ancaman-untuk-nkri.html>
- Kompas. (2022). BNPT Tutup 470 Situs dan Akun Bermuatan Radikal Sepanjang 2022. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/11410081/bnpt-tutup-470-situs-dan-akun-bermuatan-radikal-sepanjang-2022>
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(1). DOI: [10.35673/ajmp.v4i1.214](https://doi.org/10.35673/ajmp.v4i1.214)
- Polo, S. M. T. (2020). How Terrorism Spreads: Emulation and the Diffusion of Ethnic and Ethnoreligious Terrorism. Journal of Conflict Resolution, 64(10), 1916-1942. DOI: [10.1177/0022002720930811](https://doi.org/10.1177/0022002720930811)
- Rasyid, M. (2018). Perempuan dalam Jaringan Radikalisme vis a vis Terorisme Global. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 10(2).
- Republik Indonesia. (2023). Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- Republik Indonesia. (2022). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Republika. (2023). Kepala BNPT Klaim Tren Serangan Aksi Teror di Indonesia Menurun. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rxbj5m436/kepala-bnpt-klaim-tren-serangan-aksi-teror-di-indonesia-menurun>

KAJIAN TEMATIK KOMISI III



Anggaran Polri



Anggaran Polri secara nominal terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Namun secara riil peningkatan anggaran Polri tidak terjadi setiap tahun. Bahkan pada TA 2024, anggaran Polri secara riil mengalami penurunan.

Peningkatan anggaran harkamtibnas belum diikuti perbaikan kinerja



Penurunan indikator tindak pidana di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan anggarannya. Bahkan lembaga Internasional memotret adanya penurunan kondisi harkamtibnas di Indonesia sejak tahun 2015.

Penegakan Hukum



Peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan tidak pidana tidak diikuti dengan perbaikan indikator penegakan hukum di Indonesia

Penguatan Sarana Prasarana & Almitsus



Moderenisasi almitsus di lingkungan Polri belum diikuti dengan perbaikan kinerjanya secara optimal. Sehingga masih terdapat ruang bagi Polri untuk memperbaiki kinerjanya.

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum

Penanggung Jawab:

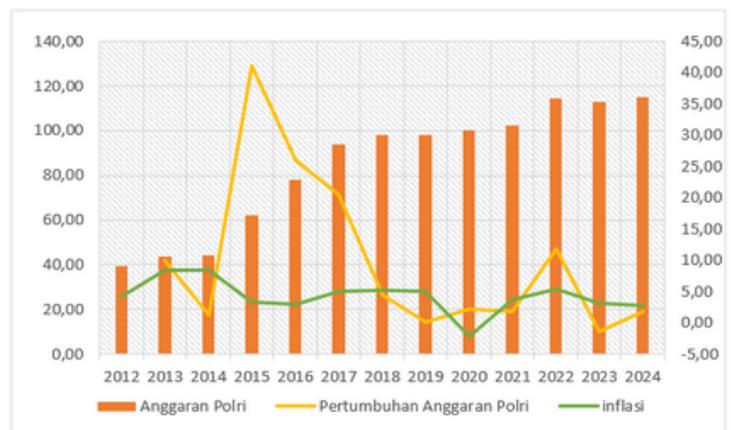
Dr. Ari Muliana Ginting, S.E, M.S.E.

Perbaiki Kinerja Polri Belum Sebanding dengan Peningkatan Anggaran

Oleh: Ratna Christianingrum, Tio Riyono & Leo Iskandar

Perkembangan anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak tahun 2014 hingga saat ini menunjukkan adanya tren peningkatan secara nominal. Namun secara riil, peningkatan anggaran Polri tidak terjadi setiap tahun. Peningkatan anggaran Polri secara riil hanya terjadi pada tahun 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2022. Pada tahun anggaran 2024, secara nominal anggaran Polri memang bertambah sebesar Rp2,09 triliun, namun secara riil anggaran Polri justru mengalami penurunan sebesar 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan nilai peningkatan anggaran Polri berada di bawah nilai inflasi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024. Dengan kata lain, peningkatan anggaran Polri tergerus oleh tingkat inflasi yang terjadi.

Gambar 1 Perkembangan Anggaran Polri, Pertumbuhan Anggaran Polri & Tingkat Inflasi



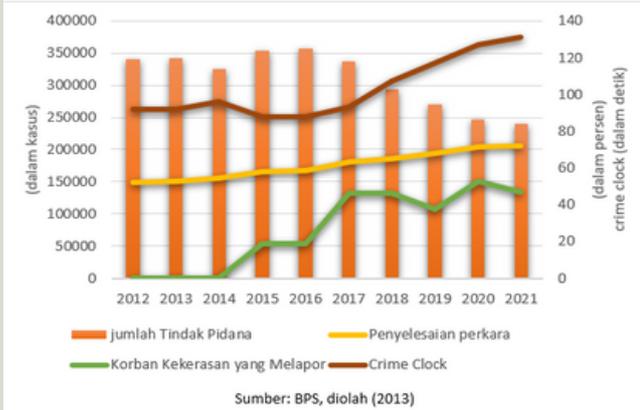
Sumber: LKPP, NK, diolah (2023)

Pada tahun 2024, Polri memiliki peran yang besar dalam melaksanakan kegiatan prioritas nasional, yaitu menjaga stabilitas hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi serta melaksanakan reformasi struktural. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui output prioritas antara lain: (1) Harkamtibnas yang kondusif guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat; (2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik; (3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik; (4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri; dan (5) pemenuhan sarana, prasarana, dan Almitsus yang modern dalam rangka penguatan keamanan IKN, destinasi pariwisata, dan objek vital.

Menjaga Harkamtibnas yang kondusif

Perkembangan anggaran program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejak tahun 2012 menunjukkan tren peningkatan (gambar 2). Anggaran program ini menempati urutan kedua sebagai program yang paling besar anggarannya di Polri setelah anggaran program dukungan manajemen. Presentase anggaran program harkamtibnas juga menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa program harkamtibnas merupakan program yang menjadi perhatian Polri.

Gambar 3 Perkembangan Jumlah Tindak Pidana, Penyelesaian Kasus Pidana, Korban Kekerasan dan Crime Clock



Indikator harkamtibnas lain yang digunakan ialah jumlah korban kekerasan yang melapor, persen penyelesaian perkara dan *crime clock*. Dari tiga indikator harkamtibnas tersebut semua menunjukkan adanya tren perbaikan sejak 2014. Indikator penyelesaian perkara pada tahun 2021 mencapai 71,85 persen. Serta *crime clock* pada tahun 2021 sebesar 131 detik, yang berarti bahwa setiap 131 detik terjadi kejahatan di Indonesia. Perbaikan indikator ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dari Polri dalam penanganan Harkamtibnas.

Gambar 4 Perkembangan Skor Keamanan dan Ketertiban



Gambar 2 Perkembangan Anggaran Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Peningkatan anggaran harkamtibnas diikuti dengan membaiknya beberapa indikator terkait harkamtibnas. Jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2012 menunjukkan adanya tren penurunan (gambar 3). Namun jumlah penurunan tindak pidana yang terjadi tidak sebanding dengan penambahan anggaran program harkamtibnas. Hal ini tentunya perlu menjadi bahan evaluasi, mengapa penurunan tindak pidana yang terjadi di Indonesia jauh lebih kecil dari penambahan anggarannya? Apakah masih terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran di Polri?

“Besarnya anggaran guna menjaga harkamtibnas yang kondusif, belum diikuti dengan perbaikan indikator harkamtibnas yang dipotret oleh lembaga Internasional

Meskipun indikator harkamtibnas yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan perbaikan, namun skor *order and security* yang dikeluarkan oleh World Justice Project menunjukkan tren sebaliknya (gambar 4). Skor keamanan dan ketertiban justru mengalami penurunan sejak tahun 2015. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa hasil potret harkamtibnas yang dilakukan Lembaga dalam negeri bisa berbeda dengan Lembaga Internasional? Hal ini dapat menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja Polri dalam menjaga harkamtibnas. Masih ada ruang yang perlu diperbaiki oleh Polri agar tercipta hakamtibnas yang kondusif, yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa aman di Masyarakat.

“Kinerja Polri dalam menjaga harkamtibnas masih ada ruang yang perlu diperbaiki.”



Penegakan hukum yang transparan

Isu penegakan hukum, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri. Dalam rangka penegakan hukum, Polri memiliki peran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015 (gambar 5). Skor penegakan hukum, skor peradilan umum, dan skor peradilan pidana yang dikeluarkan oleh World Justice Project memang menunjukkan adanya tren peningkatan. Namun peningkatan skor tersebut terjadi sangat tipis, yaitu rata-rata hanya naik 0,1 poin per tahunnya. Meskipun skor tersebut bukan hanya dibentuk berdasarkan hasil kinerja Polri, namun Polri berkontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan penegakan hukum yang *out of the box* yang mampu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. **Dukungan anggaran dan efisiensi penggunaan tentunya sangat diperlukan untuk perbaikan penegakan hukum di Indonesia**



Penguatan Sarana, Prasarana dan Almatsus



Pemenuhan sarana, prasarana, dan Almatsus yang modern dalam rangka penguatan keamanan IKN, destinasi pariwisata, dan objek vital menjadi salah satu program prioritas nasional selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dengan terjadinya lonjakan alokasi anggaran program modernisasi lamasus dan sarana prasarana Polri sejak tahun 2015. Alokasi anggaran program ini di tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya modernisasi lamasus dan Pembangunan sarana dan prasarana, diharapkan kinerja Polri akan semakin membaik. Namun perbaikan kinerja Polri masih belum optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan indikator-indikator kinerja Polri yang belum signifikan. **Untuk itu Komisi III perlu mendorong perbaikan kinerja Polri beberapa aspek yang belum optimal, seperti pada penegakan hukum dan peningkatan harkamtibnas. Dukungan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu langkah perbaikan yang dapat dilakukan Polri.**

“ Dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kinerja polri, namun di saat yang bersamaan perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran di tubuh Polri. Pada akhirnya diharapkan tercipta kinerja Polri yang optimal dan akuntabel ”

Referensi

BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: BPK RI.

BPS RI. (2023, September 3). Politik dan Keamanan. Retrieved from [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/subject/34/politik-dan-keamanan.html#subjekViewTab3): <https://www.bps.go.id/subject/34/politik-dan-keamanan.html#subjekViewTab3>

Kemenkeu RI. (2023). Buku II Nota Keuangan RAPBN . Jakarta: Kemenkeu RI.

World Justice Project. (2023, September 3). Indonesia. Retrieved from www.worldjusticeproject.org: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/Indonesia/>



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN
DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

WWW.PA3KN.DPR.GO.ID
TELP. 021-5715635 FAX. 021-5715635
INSTAGRAM: @PA3KN.BKDPRRI
YOUTUBE: PA3KN BK DPR RI